

ANALISIS BELANJA DAERAH

Wirawan Suhaedi

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Mataram

wirawan.suhaedi@unram.ac.id

Diterima : 25 Desember 2019

Direview : 26 Desember 2019

Diterbitkan: 31 Desember 2019

Abstract

This study aims to determine the financial expenditures performance of the West Lombok Regency for the 2014-2018 period. This research is a descriptive study. The results showed that the expenditures variance in West Lombok Regency in 2014 - 2018 averaged 93.30% in the favorable variance category. The majority of regional expenditure funds are allocated to operational expenditures with an average value of 79.48% while capital expenditures of 20.02%. Budget management is still inefficient with an average expenditure efficiency ratio of 93.30%.

Keywords : financial performance, regional expenditure, Budget management

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pengelolaan anggaran belanja daerah tahun 2014-2018. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan varians belanja pada Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2018 rata-rata sebesar 93,30% dalam katagori *favourable varians*. Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dengan nilai Rata-rata sebesar 79,48% sedangkan belanja modal sebesar 20,02%. Pengelolaan anggaran masih kurang efisien dengan rata-rata Rasio efisiensi belanja sebesar 93,30%.

Kata kunci : kinerja keuangan, belanja daerah, manajemen biaya

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri. Kewenangan yang besar tersebut disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dana harus dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan yaitu digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset (Jumingan 2006:239).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah

dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Salah satu penilaian yang penting dilakukan adalah penilaian atas belanja daerah. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010:156) menyatakan bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pengelolaan anggaran belanja daerah

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Unsur-unsur anggaran daerah meliputi : 1) Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara terperinci, 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan, 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, 4) Periode anggaran biasanya satu tahun (Halim (2012: 22)

Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010). Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja dibedakan menjadi 4 yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga dan belanja transfer
2. Klasifikasi menurut organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah pemerintah provinsi atau kota atau kabupaten, dinas pemerintah tingkat provinsi atau kota atau kabupaten, dan lembaga teknis daerah provinsi/kota/kabupaten.
3. Klasifikasi menurut fungsi, adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi, meliputi : belanja pelayanan umum, belanja pertahanan, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja perlindungan lingkungan hidup, belanja perumahan dan pemukiman, belanja

kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010). Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231).

Analisis Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk menilai apakah sudah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan Pemda dapat melakukan efisien atas setiap belanja. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output dan outcome* dari anggaran (Mahmudi, 2016:154).

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan analisis belanja, antara lain :

1. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

2. Rasio Keserasian

Analisis Keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul halim,2012).

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dalam satu periode anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (*recurrent*). Pada umumnya proporsi belanja operasi lebih mendominasi total belanja daerah, yaitu sekitar 60-90 persen. Biasanya daerah yang pendapatan daerahnya tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan daerah yang tingkat pendapatan daerahnya masih tergolong rendah (Mahmudi, 2016).

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Dari rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dimana pengeluaran belanja modal ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal ini tidak rutin dilakukan. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah yang tingkat pendapatan daerahnya masih tergolong rendah pada umumnya justru memiliki proporsi belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2016).

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio dalam Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100

persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran kinerja belanja Kabupaten Lombok Barat selama periode 2014-2018.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Teknik Analisis Data

1. Varian Belanja

$$\text{Varian Belanja} = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t}{\text{anggaran belanja tahun } t} \times 100\%$$

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Selisih disukai (*favourable variance*), dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya.
2. Selisih tidak disukai (*unfavourable variance*), dalam hal realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. (Mahmudi, 2016:136).

2. Rasio Keserasian

Dalam Rasio Keserasian ini ada dua Analisis Belanja yang digunakan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{antotal belanja daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 1. Analisis varians belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	Kinerja
2014	1.183.706.491.611,69	1.115.268.464.937,76	94,22	Favourable Variance
2015	1.440.316.574.065,63	1.351.218.021.265,91	93,81	Favourable Variance
2016	1.620.589.165.431,93	1.484.537.233.745,94	91,60	Favourable Variance
2017	1.749.413.962.654,20	1.600.738.861.165,90	91,50	Favourable Variance
2018	1.721.359.602.928,26	1.641.955.614.493,70	95,39	Favourable Variance
Rata-rata	1.543.077.159.338	1.438.743.639.122	93,30	Favourable Variance

Sumber : Data olahan tahun 2014 - 2018

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata anggaran belanja tahun 2014-2018 sebesar Rp 1.543.077.159.338 dengan tingkat realisasi belanja sebesar Rp 1.438.743.639.122 dengan tingkat varians Belanja sebesar 93,30%. Varian ini masuk dalam dikategorikan selisih disukai (*Favourable varians*) karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal itu berarti Pemerintah dapat mengendalikan dan penghematan belanja sehingga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

2. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tabel 2. Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	911.521.343.766,76	1.115.268.464.937,76	81,73
2015	1.076.886.278.528,91	1.351.218.021.265,91	79,70
2016	1.202.842.098.401,59	1.484.537.233.745,94	81,02
2017	1.188.473.114.813,46	1.600.738.861.165,90	74,25
2018	1.325.670.823.407,40	1.641.955.614.493,70	80,74
Rata-rata	1.141.078.731.784	1.438.743.639.122	79,48

Sumber : Data olahan tahun 2014 - 2018

Berdasarkan hasil analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja diatas rata-rata belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar 79,48% dimana dari rata-rata belanja operasi sebesar Rp 1.141.078.731.784 dibandingkan dengan rata-rata total belanja daerah sebesar Rp 1.438.743.639.122. Hal ini menunjukkan sebagian besar anggaran belanja digunakan untuk belanja operasi terutama untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa.

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

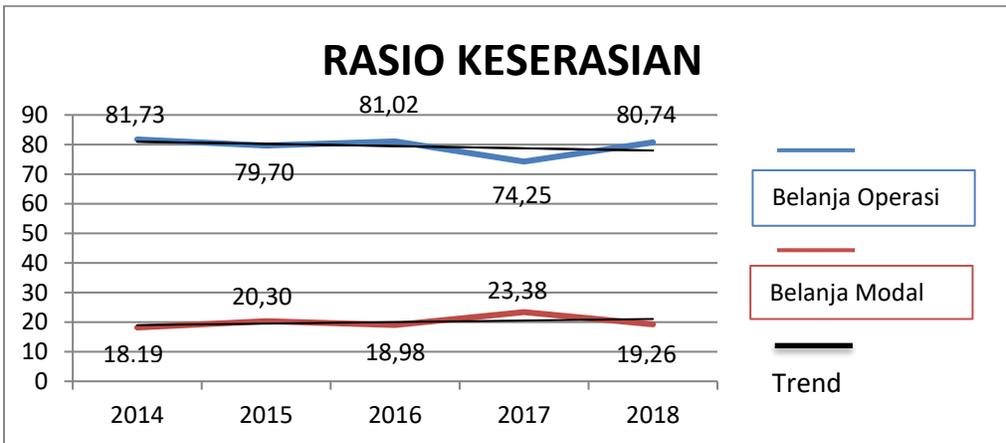
Tabel 3. Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	202.897.307.528,00	1.115.268.464.937,76	18,19
2015	274.331.742.737,00	1.351.218.021.265,91	20,30
2016	281.695.135.344,35	1.484.537.233.745,94	18,98
2017	374.266.537.352,44	1.600.738.861.165,90	23,38
2018	316.284.791.086,30	1.641.955.614.493,70	19,26
Rata-rata	289.895.102.810	1.438.743.639.122	20,02

Sumber : Data olahan tahun 2014 - 2018

Berdasarkan hasil analisis belanja modal terhadap total belanja, rata-rata belanja modal yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun -2018 sebesar 20,02%. Rata-rata belanja modal sebesar Rp 289.895.102.810 sedangkan rata-rata total belanja daerahnya sebesar Rp 1.438.743.639.122. rasio belanja modal mengalami fluktuasi berkisara antara 18 - 23%. Sebagian besar belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rasio Keserasian Belanja di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2018 terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Keserasian Belanja di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan grafik diatas, secara keseluruhan dari tahun 2014 - 2018 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan rata-rata 79,48% digunakan untuk belanja operasional dan 20,02% digunakan untuk belanja modal. Untuk pengalokasian belanja operasinya setiap tahunnya mengalami sedikit peningkatan dari sisi jumlah namun mengalami penurunan dalam presentase. Pada tahun 2017 terlihat adanya penurunan belanja operasi yang diikuti oleh peningkatan belanja modal.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Tabel 4. Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kinerja
2014	1.115.268.464.937,76	1.183.706.491.611,69	94,22	Kurang Efisien
2015	1.351.218.021.265,91	1.440.316.574.065,63	93,81	Kurang Efisien
2016	1.484.537.233.745,94	1.620.589.165.431,93	91,60	Kurang Efisien
2017	1.600.738.861.165,90	1.749.413.962.654,20	91,50	Kurang Efisien
2018	1.641.955.614.493,70	1.721.359.602.928,26	95,39	Kurang Efisien
Rata- rata	1.438.743.639.122	1.543.077.159.338	93,30	Kurang Efisien

Sumber : Data olahan tahun 2014 - 2018

Secara keseluruhan jika dilihat rata-rata presentase rasio efisiensi daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Daerah Lombok Barat sebesar 93,30% yang artinya kinerja pemerintah dinilai kurang efisien dalam belanjanya karena realisasinya hampir dari 100% terhadap anggaran yang dimana realisasi belanjanya sebesar Rp 1.438.743.639.122 dari anggaran belanja sebesar 1.543.077.159.338. Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum melakukan penghematan.

Semakin kecil nilai rasio ini berarti semakin efisien. Tetapi belum tentu dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai kinerja yang baik karena bisa jadi Pemerintah Daerah melakukan penghematan sehingga realisasi belanjanya kurang maksimal atau bisa juga karena terdapat anggaran belanja yang tidak terealisasikan. Pemerintah Daerah dapat juga

membuat anggaran yang besar sehingga realisasi belanjanya tidak mencapai anggaran yang ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisis rasio belanja Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis Varians Belanja pada Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014 - 2018 rata-rata sebesar 93,30% masuk dalam katagori selisih disukai (*Favourable varians*) karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.
2. Dari Rasio Keserasian, belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi. Rata-rata belanja operasi tahun 2014-2018 sebesar 79,48% sedangkan belanja modal sebesar 20,02%.
3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan realisasi anggaran belanja tidak pernah melebihi anggran belanja. Rata-rata rasio efisiensi tahun 2014-2018 sebesar 93,30%. Hal ini menunjukkan Pemda Kabupaten Lombok Barat masih kurang efisien dalam melakukan penghematan atau efisisensi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Bahrn. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Skripsi Yogyakarta : UNY.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan*

Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprpto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Tiga)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wilantari, Wening. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014*. Skripsi Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta